

# **ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DENGAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS : BKD PROVINSI JAWA TENGAH )**

**Rafelia Putri S**

Jurusan Sistem Informatika, Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro  
Jl. Nakula I, No. 5-11, Semarang, Kode Pos 50131, Telp. (024) 3515261, 3520165 Fax: 3569684  
E-mail : rafeliaps@yahoo.co.id

---

## **Abstrak**

*BKD Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi pemerintahan yang khusus menangani masalah kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) se-Jawa Tengah. Dengan jumlah PNS yang diketahui ada sekitar 15866 orang, sehingga dalam pengolahan data menggunakan suatu sistem informasi agar memperlancar tugas pokok dan fungsi pada bidang pengolahan data di BKD. Dalam sistem informasi kepegawaian ini diperlukan suatu pengawasan dan evaluasi untuk mengetahui apakah sistem berjalan sesuai perencanaan. Dalam penelitian ini membahas tentang proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem kepegawaian khususnya di bidang pengolahan data di BKD Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan COBIT 4.1 domain Monitoring and Evaluate Performance (ME1). Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana tingkat kematangan dan harapan yang diinginkan dari proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian pada bidang pengolahan data. Untuk tingkat kematangan saat ini berada di tingkat 2,21 ini berarti proses pengawasan dan evaluasi masih kurang. Untuk tingkat harapan 74,1% menganggap sangat pentingnya dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sistem. Rekomendasi yang diberikan berupa penetapan Key Performance Indicator (KPI), Key Goal Indicator (KGI) dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat kematangan pada tingkat 4 untuk proses pengawasan dan evaluasi.*

**Kata kunci** : Pengawasan dan Evaluasi, Audit Sistem Informasi, COBIT 4.1, Sistem Informasi Kepegawaian, Tingkat Kematangan

## **Abstract**

*BKD Central Java as a government agency specifically address the issue of staffing Civil Servants (PNS) in Central Java. With the number of civil servants who are known to exist around 15866 people, resulting in the processing of the data using an information system in order to facilitate the duties and functions in the field of data processing at BKD. In a personnel information system is a monitoring and evaluation is needed to determine whether the system is running according to plan. In this study discusses the process of monitoring and evaluation of system performance, especially in the field of human resources in a data processing BKD Central Java domain using COBIT 4.1 Monitoring and Evaluate Performance (ME1). By using descriptive quantitative research methods, this study aims to describe how the maturity level and desired expectations of the process of monitoring and evaluating the performance of information systems personnel in the field of data processing. For the current maturity level was at 2.21 level this means that the process of monitoring and evaluation is still lacking. For the 74.1% level expectation assumes great importance of supervision and evaluation of system performance. The recommendations given in the form of the establishment of Key Performance Indicators (KPI), Key Goal Indicators (KGI) and efforts should be made to reach a level of maturity at level 4 for process monitoring and evaluation*

**Keywords** : Monitoring and Evaluation, Information Systems Audit, Employee Information System, COBIT 4.1, Maturity Level

## 1. PENDAHULUAN

Sistem informasi kepegawaian sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada seluruh personalia yang ada karena pegawai merupakan asset penting dalam penyelenggaraan organisasi yang perlu dikelola dengan baik. jumlah PNS di Jawa Tengah sebanyak 15.866 orang, dalam mengolah data ini BKD menggunakan suatu sistem informasi kepegawaian. Untuk mengetahui perlu atau tidaknya suatu perbaikan atau pengembangan terhadap pengelolaan sistem informasi pada proses pengolahan data ini, organisasi melakukan suatu kegiatan pengawasan dan evaluasi. BKD menyadari tentang pentingnya kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja ini karena berguna untuk mengetahui bagaimana kinerja sistem yang telah berjalan saat ini. Namun untuk saat ini pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BKD masih belum terstruktur.

Dan untuk mengetahui apa saja kekurangan lainnya pada proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian ini, harus dilakukannya pengukuran tingkat kematangan (*maturity level*), menurut COBIT pengukuran ini akan dilakukan pada domain monitoring evaluation (ME) dan khususnya pada monitoring and evaluation IT performance (ME1).

### 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status tingkat kematangan pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian khususnya pada bidang pengelolaan data di Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jawa Tengah saat ini berdasarkan dengan kerangka kerja COBIT 4.1.

2. Bagaimana tingkat harapan atas pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian di bidang pengelolaan data pada Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jawa Tengah.
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat pengawasan dan evaluasi pengelolaan data yang sesuai dengan harapan.

### 1.2 Batasan Masalah

Lingkup dari analisis ini adalah terbatas pada menilai sejauh mana penerapan pengawasan dan evaluasi kinerja (ME1) sistem informasi kepegawaian khususnya pada bidang pengolahan data yang akan diukur dengan tingkat kematangan (*maturity level*) dengan menggunakan salah satu dari beberapa IT Governance tools yang ada yaitu kerangka kerja COBIT 4.1. Karena COBIT adalah pedoman pengendalian teknologi informasi yang paling banyak digunakan dan diterima secara luas sebagai kerangka kerja untuk bagian sistem teknologi informasinya.

### 1.3 Tujuan

1. Memberi gambaran dan informasi tentang pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian pada bidang pengelolaan data di Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jawa Tengah saat ini berdasarkan dengan kerangka kerja COBIT 4.1.
2. Menggambarkan tentang tingkat kesadaran dan harapan mengenai pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian pada bidang pengelolaan data di Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jawa Tengah saat ini berdasarkan dengan kerangka kerja COBIT 4.1
3. Membantu menentukan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat yang sesuai dengan harapan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Audit Sistem Informasi

Audit didefinisikan sebagai proses atau aktifitas yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk menemukan suatu bukti-bukti (*audit evidence*) dan dievaluasi secara obyektif untuk menentukan apakah telah memenuhi kriteria pemeriksaan (audit) yang ditetapkan. Tujuan dari audit adalah untuk memberikan gambaran kondisi tertentu yang berlangsung di perusahaan dan pelaporan mengenai pemenuhan terhadap sekumpulan standar yang terdefinisi[4]

### 2.2 Tujuan Audit Sistem Informasi

Tujuan Audit Sistem Informasi dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama dari ketatakelolaan IT, yaitu : [12]

- a. *Conformance* (Kesesuaian) – Pada kelompok tujuan ini audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu: *Confidentiality* (Kerahasiaan), *Integrity* (Integritas), *Availability* (Ketersediaan) dan *Compliance* (Kepatuhan).
- b. *Performance* (Kinerja) – Pada kelompok tujuan ini audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu: *Effectiveness* (Efektifitas), *Efficiency* (Efisiensi), *Reliability* (Kehandalan).

### 2.3 Kerangka Kerja COBIT

COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) adalah ke-rangka IT *governance* yang ditujukan kepada manajemen, staf pelayanan TI, *control de-partement*, fungsi audit dan lebih penting lagi bagi

pemilik proses bisnis (*business process owner's*), untuk memastikan *confidentiality*, *integrity* dan *availability* data serta informasi sensitif dan kritis. Terdapat tiga tingkat (*level*) usaha pengaturan TI yang menyangkut manajemen sumber daya TI. Mulai dari bawah, yaitu kegiatan dan tugas (*activities and tasks*) yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dapat diukur. Dalam aktivitas terdapat konsep siklus hidup yang di dalamnya terdapat kebutuhan pengendalian khusus. Kemudian satu lapis di atasnya terdapat proses yang merupakan gabungan dari kegiatan dan tugas (*activities and tasks*) dengan keuntungan atau perubahan (pengendalian) alami. Pada tingkat yang lebih tinggi, proses biasanya dikelompokkan bersama kedalam domain. Pengelompokan ini sering disebut sebagai tanggung jawab domain dalam struktur organisasi dan yang sejalan dengan siklus manajemen atau siklus hidup yang dapat diterapkan pada proses TI.

### 2.4 *Monitoring and Evaluation (ME)*

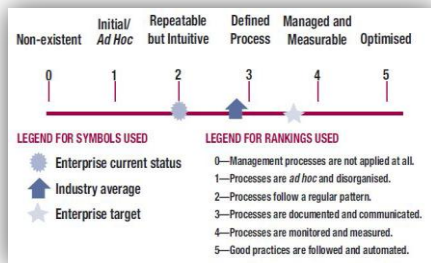
Semua proses IT perlu dinilai secara teratur sepanjang waktu untuk menjaga kualitas dan pemenuhan atas syarat pengendalian. Domain ini menunjuk pada perlunya pengawasan manajemen atas proses pengendalian dalam organisasi serta penilaian independen yang dilakukan baik auditor internal maupun eksternal atau diperoleh dari sumber-sumber alternatif lainnya. Berikut proses-proses TI pada domain *monitoring and evaluate*

1. ME1: memonitor dan mengevaluasi kinerja TI
2. ME2 :memonitor dan mengevaluasi pengendalian internal

3. ME3 : memastikan kepatuhan terhadap persyaratan eksternal;
4. ME4 : menyediakan pengelolaan.

5 = Tahap dimana manajemen telah berkomitmen terhadap proses yang ada agar dapat menjadi suatu kebiasaan yang selalu dikembangkan

## 2.5 Model Tingkat Kematangan



Grafik Representasi *Maturity Model*  
(Sumber: ITGI, 2011)

0 = Tidak terdapat proses terkait sama sekali

1 = Tahap dimana manajemen sadar akan pentingnya diperhatikan proses terkait, tetapi implementasi yang terjadi masih bersifat reaktif, sesuai dengan kebutuhan mendadak dan tidak terorganisir

2 = Tahap dimana manajemen memiliki pola untuk mengelola proses terkait berdasarkan pengalaman yang berulang yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, akan tetapi pola tersebut belum terstandarisasi

3 = Tahap dimana manajemen telah berhasil menciptakan dan mengkomunikasikan standar baku pengelolaan proses terkait, walaupun belum dilakukan secara terintegrasi

4 = Tahap dimana kegiatan dan standar yang ada telah diterapkan secara formal dan terintegrasi. Serta terdapat pola indikator sebagai pengukur kemajuan kinerja secara kuantitatif

Dalam penilaian dan Pengukuran tingkat kematangan proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem dilakukan dengan 6 atribut kematangan, yaitu :

1. *Awareness and Communication* ( Kesadaran dan Komunikasi)
2. *Policies, standards and Procedures*(Kebijakan, Standard an Prosedur)
3. *Tools and Automations* (Alat bantu dan Otomasi)
4. *Skills and Expertise* (Keterampilan dan Keahlian)
5. *Responsibility and Accountability* (Pertanggungjawaban internal dan eksternal)
6. *Goal Setting and Measurement* (Penetapan tujuan dan Pengukuran)

## 2.6 Konsep Monitoring Evaluation

Monitoring dan Evaluasi (ME) adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda yaitu kata Monitoring dan Evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut.

## 3. METODE PENELITIAN

Untuk mengolah data yang sudah didapatkan dari kuesioner dan wawancara, pengolahannya dilakukan dengan tiga cara analisis sebagai berikut:

### 3.1 Analisis Kesadaran Pengelolaan (Management Awareness)

Analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana gambaran dari tingkat harapan ( to-be ) terhadap proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem kepegawaian khususnya pada teknologi informasi pengolahan data di Badan Kepegawaian Daerah. Dan melihat tentang gambaran pihak-pihak mana saja yang yang berkepentingan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan. Dan data ini diperoleh dari kuesioner kesadaran pengelolaan mengenai pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap pengolahan data di BKD, dan kemudian informasi direkapitulasi untuk mengetahui atau menggambarkan berapa presentasi dari jawaban-jawaban yang ada, yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan proses pengawasan dan evaluasi kinerja yang akan menjadi gambaran tentang tingkat harapan.

### 3.2 Analisis Tingkat Kematangan (Maturity Level)

Analisis ini untuk mengukur tingkat kematangan dari proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem pengolahan data. Informasi didapat dari kuesioner tingkat kematangan, yang terdiri dari 6 pilihan jawaban dengan skala penilaian 0 – 5. Data dari kuioner akan diambil rata-rata dari setiap jawaban untuk mengetahui tingkat kematangan keseluruhan.

### 3.3 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Setelah dilakukan kuesioner tingkat kesadaran pengolahan dan kuesioner tentang tingkat kematangan , kemudian akan diketahui keadaan aktual dari tingkat harapan pengelolaan dan tingkat kematangan, tahap selanjutnya akan dilakukan analisis kesenjangan ini yang dimaksudkan untuk mengetahui

kegiatan apa yang harus dilakukan oleh badan kepegawaian daerah agar tingkat kematangan saat ini bisa mencapai tingkat harapan yang diinginkan.

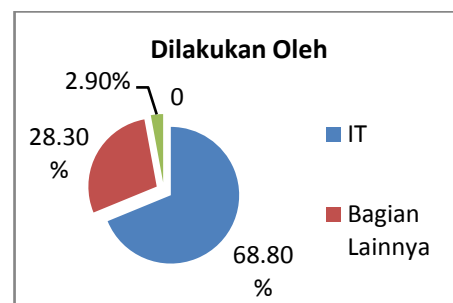
## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Kesadaran Pengelolaan

Pada tahap analisis ini dilakukan pengumpulan data mengenai pengawasan dan evaluasi di BKD Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan dengan cara kuesioner. Kuesioner terdiri dari 9 pertanyaan dan 15 responden yaitu staff dari bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data. Berikut ini adalah penjabarannya:

**Tabel 4.1 Prosentase Hasil Kuesioner Kesadaran Pengelolaan**

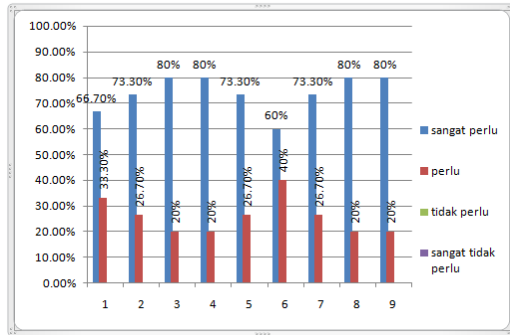
AKTIVITAS	TINGKAT KEPERLUAN				DILAKUKAN OLEH			
	Sangat Perlu	Perlu	Tidak Perlu	Sangat Tidak Perlu	Bagian IT	Bagian lain	Pihak eksternal	Tidak tahu
1	66,7%	33,3%	0%	0%	86,7%	13,3%	0%	0%
2	73,3%	26,7%	0%	0%	86,7%	13,3%	0%	0%
3	80%	20%	0%	0%	93,3%	6,7%	0%	0%
4	80%	20%	0%	0%	73,3%	13,3%	13,3%	0%
5	73,3%	26,7%	0%	0%	73,3%	26,7%	0%	0%
6	60%	40%	0%	0%	86,7%	13,3%	0%	0%
7	73,3%	26,7%	0%	0%	80%	20%	0%	0%
8	80%	20%	0%	0%	20%	80%	0%	0%
9	80%	20%	0%	0%	20%	66,7%	13,3%	0%



**Gambar 0.1**  
**Bagan Prosentase Pihak Mana Yang Bertanggung Jawab**

Dari sini bisa dilihat bahwa para pengelola sistem lebih berharap bahwa kegiatan pengawasan dan evaluasi

kinerja sistem informasi kepegawaian pada BKD Provinsi Jawa Tengah ini dipegang oleh bagian IT karena yang lebih mengerti dan memahami mengenai sistem yang ada saat ini.



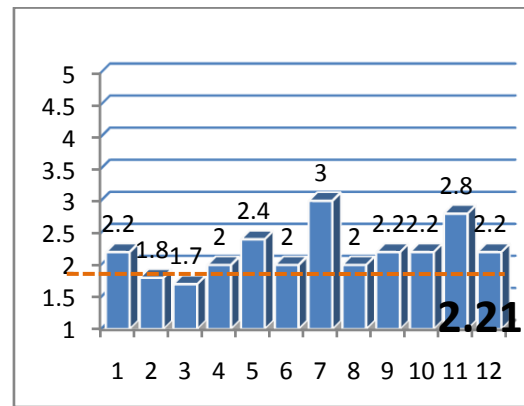
**Gambar 0.1**  
**Bagan Prosentase Tingkat Keperluan Pengawasan dan Evaluasi**

Dari hasil perolehan data yang dilakukan, menunjukkan seberapa besar tingkat harapan dari para pengguna sistem mengenai proses pengawasan dan evaluasi yang harusnya dilakukan, setelah dirata-rata dari data yang diperoleh ada 76,3% yang berpendapat sangat setuju dan 23,7% yang berpendapat setuju dengan proses pengawasan dan evaluasi pada sistem informasi kepegawaian di BKD, sisanya 0% yang berpendapat tidak setuju dan 0% yang berpendapat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa harapan para pengguna sistem terhadap adanya proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian di BKD ini sangat besar karena pengawasan dan evaluasi sistem dianggap sangat penting dan juga dibutuhkan untuk meminimalis kesalahan-kesalah yang akan terjadi dan untuk pengembangan sistem yang dibutuhkan.

#### 4.2 Analisis Tingkat Kematangan

Pada tahap analisis ini dilakukan pengumpulan data mengenai pengawasan dan evaluasi di BKD

Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan dengan cara kuesioner. Kuesioner terdiri dari 12 pertanyaan dan 9 responden yaitu staff yang paham dalam bidang IT dari bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data. Dari pertanyaan-pertanyaannya diambil rata-rata untuk mengetahui tingkat kematangan proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian di BKD



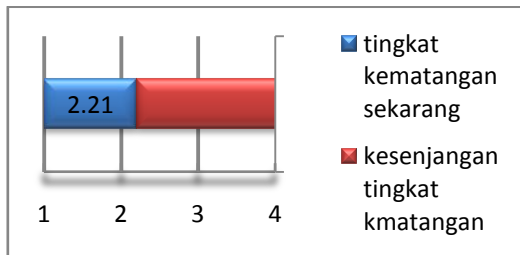
**Gambar 0.2**  
**Bagan Hasil Kuesioner Tingkat Kematangan**

Bagan hasil kuesioner Tingkat kematangan ini menggambarkan secara keseluruhan bagaimana tingkat kematangan kegiatan pengawasan dan evaluasi yang ada pada BKD saat ini. Dan dari hasil kuesioner setelah dirata-rata tingkat kematangan berada pada tingkat 2 ( 2,21 ), ini berarti kegiatan pengawasan dan evaluasi menurut Pengukuran COBIT dinilai masih kurang.

#### 4.3 Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan dilakukan setelah mengetahui tingkat harapan dari pengelola sistem untuk kegiatan pengawasan dan evaluasi yang didapat melalui kuesioner 1 dan juga tingkat kematangan dari kegiatan pengawasan dan evaluasi melalui kuesioner dan

disertai wawancara pada pengelola sistem. Analisis kesenjangan ini digunakan untuk menentukan upaya apa yang harus dilakukan untuk mencapai tingkatan yang diharapkan



**Gambar 0.3**  
**Bagan Kesenjangan Tingkat Kematangan**

Bagan diatas adalah bagan kesenjangan tingkat kematangan, disini menunjukkan bahwa tingkat kematangan kegiatan pengawasan dan evaluasi saat ini masih berada pada tingkat 2 (2,21) sementara karena belum adanya standart yang ditetapkan pada proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian di BKD saat ini, maka para pengguna sistem berharap untuk kedepannya tingkat kematangan pada proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem ini berada tingkat 4. Yaitu dari proses yang belum terstruktur dan terintegrasi, menjadi proses yang terstruktur, terintegrasi, lebih formal dan mempunyai pola yang terstandar dalam pengukuran. Sehingga untuk dapat mencapai pada tingkatan 4 dibutuhkan upaya-upaya pengembangan.

Dalam pengukuran terhadap perfomansi suatu proses yang berhubungan dengan IT, COBIT menggunakan dua macam Pengukuran yaitu Key Goal Indicator (KGI) dan Key Performance Indicator (KPI):

1. Key Goal Indicator (KGI) menetapkan ukuran apa yang dapat memenuhi kebutuhan yang

diinginkan. Dalam proses pengawasan dan evaluasi KGI disini sebagai berikut:

- a. Pelaksaaan kegiatan pegawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.
- b. Pada pengawasan dan evaluasi harus mempunyai suatu kebijakan atau prosedur yang formal.
- c. Pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
- d. Pengawasan harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi
- e. Pengintegrasian pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dengan sistem yang ada
- f. Perbaikan dan pengembangan sistem dilakukan sesuai hasil dari penilaian kebutuhan.
- g. Penilaian dilakukan dengan indikator-indikator sesuai dengan kebijakan yang ada

2. Key Performance Indicator ( KPI ) Menetapkan ukuran yang menentukan seberapa baik performa suatu proses pengawasan dan evaluasi kinerja (ME1) dalam rangka tercapainya tujuan IT, sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kesalahan yang terjadi pada sistem
- b. Kepuasan pengguna sistem dalam mengelola sistem dan penerima informasi dalam mengakses informasi.
- c. Keamanan pada sistem untuk menjaga data-data yang tidak bisa diakses oleh publik.
- d. Keseimbangan antara target yang ingin dicapai dengan hasil dari proses pengawasan dan evaluasi.

Pada tingkat kematangan di tingkat 4 mempunyai beberapa aspek yang

berkaitan dengan pertanyaan pada koesoner yang harus dipenuhi, dan untuk memenuhi harapan dari pengguna sistem untuk ada pada tingkat kematangan di tingkat 4 untuk kegiatan ini, maka perlu dilakukan upaya-upaya berikut dari setiap aspek yang ada :

1. Kesadaran dan komunikasi

- a. Untuk kesadaran ini para pengguna sistem diharapkan mempunyai tingkat pemahaman mengenai pengawasan dan evaluasi kinerja sistem ini seperti standar Pengukuran yang harusnya digunakan dan apa saja yang diperlukan dalam kegiatan,
- b. untuk komunikasi harus adanya komunikasi yang baik dari pihak-pihak terkait yaitu pengelola sistem, kepala badan dan bagian pengadaa nmengenai proses pengawasan dan evaluasi agar nantinya tercipta kesepaham yang sama sehingga proses ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Kebijakan, Standard an Prosedur

Adanya kebijakan dan prosedur yang berstandarisasi dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi ini sebagai rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, seperti pelaksanaan yang dilakukan dengan tepat sesuai prosedur akan memungkinkan pelaksanaan suatu kegiatan agar bisa mencapai tujuannya.

3. Alat dan otomasi

Adanya suatu pengintegrasian pada sistem terhadap kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja ini yang berguna untuk menunjang aktivitas pengawasan dan evaluasi kinerja sistem

4. Keahlian dan keterampilan

- a. Adanya keahlian atau kemampuan dari para pengelola sistem mengenai pengawasan dan evaluasi kinerja agar, kegiatan ini nantinya akan dapat dilaksanakan secara rutin. Meningkatkan kemampuan bisa dengan kegiatan-kegiatan seperti forum diskusi atau seminar yang berhubungan dengan kegiatan ini.
  - b. Pelatihan mengenai pengawasan dan evaluasi pada pengelola sistem akan membantu meningkatkan pemahaman dan keahlian dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi ini
5. Tanggung jawab
- Adanya pembagian tanggung jawab atas kegiatan pengawasan dan evaluasi ini sesuai kemampuan. Mereka yang diberi tugas harus menjalankan tugasnya ini sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Para pihak yang terkait dan akan mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam upaya penyelesaian masalah yang terdeteksi.
6. Penetapan dan pencapaian tujuan
- a. Penggunaan sebuah metode dalam pengukuran kinerja akan sangat penting, seperti dengan menggunakan IT balance scorecard, karena ini dengan ini dapat mengukur kebutuhan dari pengelola mengenai sistem yang sudah ada, kepuasan pengguna sistem , termasuk juga tingkat efektif dan efisiennya.
  - b. Adanya penetapan mengenai perencanaan kegiatan dan tujuan dari kegiatan pengawasa dan evaluasi kinerja sistem ini yang berstandarisasi.



## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat kematangan pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian ini, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Tingkat kematangan pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian (ME1) di BKD Provinsi Jawa Tengah saat ini dengan menggunakan metode COBIT, didapatkan hasil berada pada tingkat kematangan 2,21, dengan kata lain untuk proses pengawasan dan evaluasi ini masih berada pada posisi yang kurang, disebabkan karena proses pengawasan dan evaluasi saat ini masih belum terorganisir dan belum ada standarisasinya.

Tingkat kesadaran pengelolaan menurut COBIT untuk proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian di BKD Provinsi Jawa Tengah untuk pengukuran tingkat keperluan menunjukkan bahwa besarnya tingkat harapan para pengelola sistem untuk diadakannya pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian dan juga pembagian tugas agar proses dapat terorganisir dengan baik. Menurut mereka ini penting untuk pendeteksian kelemahan dan untuk adanya kemajuan dan perkembangan pada sistem nantinya.

Untuk upaya pencapaian tingkat 4 itu dilakukan analisis kesenjangan, dengan kriteria pengukuran KGI (*Key Goal Indicator*), KPI (*Key Performance Indicator*) dan juga dengan melihat beberapa aspek akan membantu menemukan upaya untuk mencapai tingkat 4.

### 5.2 Saran

Setelah penelitian dilakukan untuk adanya pengembangan untuk proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian di BKD Provinsi Jawa Tengah ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu ada suatu kebijakan dan prosedur yang terstandar dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi kepegawaian di BKD ini. Agar kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara berkala dan konsisten, dan juga kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
2. Diadakan komunikasi secara rutin antara pihak pengelola sistem yaitu kepala badan, bagian IT dan bagian pengadaan mengenai proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem seperti mengenai kebutuhan-kebutuhan untuk proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem, pengeluaran atau biaya yang dibutuhkan dan juga perencanaan tindak lanjut untuk pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian ini.
3. Adanya pelatihan-pelatihan kepada staff bagian IT pada pengolahan data dan dokumentasi mengenai proses pengawasan dan evaluasi kinerja sistem untuk menambah pemahaman, pengetahuan dan keahlian para pengelola sistem khususnya untuk kegiatan pengawasan dan evaluasi sistem.
4. Dilakukan pembagian tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi ini, karena tingkat kepahaman mengenai pengawasan dan evaluasi dengan menggunakan

metode yang terstandarisasi masih kurang, maka dibutuhkan bantuan dari pihak internal dibagian pengolahan data dan dokumentasi lainnya.

5. Dalam pengidentifikasian dan pengumpulan data harus dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup kontribusi otomasi terhadap BKD, kinerja otomasi terhadap pencapaian tujuan dan perencanaan dari BKD, kepuasan pengguna mengenai kinerja otomasi, perkembangan terhadap otomasi, dan juga kegiatan apa yang berorientasi kepada kemajuan sistem.
6. Perlu ada tindak lanjut untuk setiap penilaian dari pengawasan dan evaluasi sistem yang dilakukan. Selain pembuatan laporan sesuai prosedur yang ada tentang hasil penilaian, tindak lanjut ini berupa pengembangan atau perbaikan sistem yang akan lebih baik dalam proses ini dibantu oleh pihak eksternal.

#### **DAFTAR PUSTAKA [Penulisan judul tanpa ada nomor dan ditulis huruf besar semua, Bold, Times New Roman, 12]**

- [1] Pengarang, Inisial., Tahun. Judul Artikel. *Judul lengkap jurnal*, Nomor volume (Issue/Part n Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (<http://pilarsolusi.com/> ; Acces data : 21/03/2014.
- [2] Gondodiyoto, S. 2007. *Audit Sistem Informasi Pendekatan COBIT*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [3] IT, Governance Institut 2007
- [4] Rizki, Noka. *Evaluasi Maturity Level & Manajemen Awareness Menggunakan COBIT domain AI & ME pada IST Devision Total E&P Balikpapan*. Universitas Brawijaya; Malang.
- [5] Purwanto, *Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Krangka Kerja COBIT dalam Mendukung Layanan Sistem Informasi Akademik*, Jurnal Telematika MKOM, Universitas Budi Luhur, 2010.
- [6] Nurdiana, Dindin. *Analisis IT Governance Untuk Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT*. Universitas Siliwangi ; Tasikmalaya.
- [7] Melisa Handoko, *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian*, <http://melisahandoko.blogspot.com/2010/05/sistem-informasi-manajemen-kepegawaian.html> ; Acces data : 21/03/2014.
- [8] Siagian, Sondang P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- [9] Rivai, Veithzal. & Sagala, Ella Jauvani. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [10] Arif RH, *Manajemen Kepegawaian Indonesia*, <http://arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah/manajemen-publik/manajemen-kepegawaian-indonesia/> ; Acces data : 22/03/2014.
- [11] Weber, Ron, 2009. *Information System Control and Audit*. Prentice-Hall.
- [12] Sano, Riyanarto. 2010. *Audit Sistem dan Teknologi Informasi*. ITS Press: Surabaya.
- [13] Anonymous, *Pengertian Kerangka Kerja COBIT*, <http://xerma.blogspot.com/2013/04/pengertian-kerangka-kerja>

- [cobit.html](#) ; Acces data : 22/03/2014.
- [14] Setiawan, Alexander. 2008. *Pengaruh kematangan, Kinerja dan perkembangan Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi Swasta Yogyakarta dengan model Framework*. Universitas Kristen Petra.
- [15] Asep Suryana, *Strategi Monitoring dan Evaluasi*, [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. ADMINISTRASI PENDIDIKAN/197203211999031\\_ASEP SURYANA/STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031_ASEP_SURYANA/STRATEGI_MONITORING_DAN_EVALUASI.pdf) ; Acces data : 22/03/2014.
- [16] Anonymous, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19622/4/Chapter%20II.pdf> ; Access data ; 23//03/2014